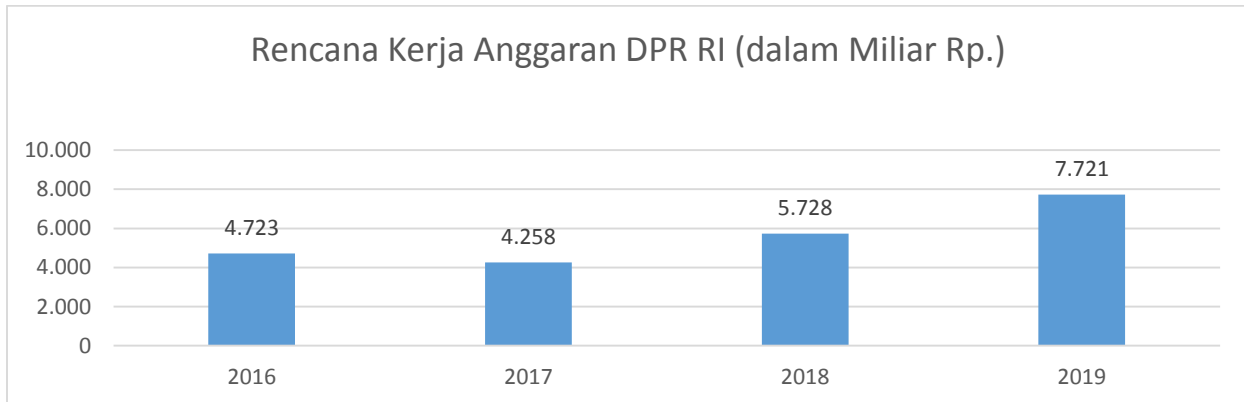


RILIS FITRA 12/04/2018

FITRA KONSISTEN TOLAK ANGGARAN FASIIITAS & GEDUNG BARU DPR

Oleh: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

DPR RI dalam rapat paripurnanya mengesahkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2019 mencapai Rp. 7,7 triliun atau peningkatan sekitar 26% (Rp 2 Triliun) dibandingkan tahun 2018. Meningkatnya RKA tersebut untuk membiayai penataan kompleks parlemen berupa pembuatan gedung baru dan alun-alun demokrasi.



Usulan ini bukan pertama kalinya terjadi, pada tahun 2006, 2009, 2014, 2016, dan 2018 -DPR RI juga mengusulkan penambahan gedung baru. Bahkan ditahun 2009 DPR RI tidak malu untuk menambahkan fasilitas mewah berupa Gym dan kolam renang.

Usulan DPR tahun 2009	Usulan DPR tahun 2014	Usulan DPR tahun 2016
Gedung baru dengan Fasilitas Gym dan kolam renang.	Gedung baru dengan Fasilitas museum, pusat penelitian, dan perpustakaan	Gedung baru dengan fasilitas kesehatan dan kendaraan mewah.

FITRA berpendapat, DPR seharusnya malu mengusulkan kenaikan anggaran tersebut, apa lagi jika melihat kinerja legislasi pada tahun 2017, DPR RI hanya mampu mengesahkan 5 UU (di luar RUU kumulatif terbuka) dari target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 53 RUU. Rendahnya kinerja legislasi tersebut dibarengi dengan buruknya citra DPR karena pimpinan dan anggota DPR yang bermasalah hukum. DPR RI pada masa 2015-2019 menciptakan sejarah karena dalam satu priode sempat berganti ketua beberapa kali, hal ini juga menunjukkan ketidak efektifan politik di DPR. Akibatnya masyarakat tidak akan pernah percaya dengan DPR RI apa lagi ingin menambah fasilitas.

Nama	Menjabat	Selesai
Fadli Zon (Pelaksana Tugas)	18-Des-15	11-Jan-16
Ade Komarudin	11-Jan-16	30-Nov-16
Setya Novanto	30-Nov-16	11-Des-17

Fadli Zon (Pelaksana Tugas)	11-Des-17	15-Jan-18
Bambang Soesatyo	15-Jan-18	<i>masih menjabat</i>

FITRA konsisten menolak kenaikan anggaran DPR yang digunakan untuk fasilitas dan gedung baru. Oleh karena itu FITRA merekomendasikan:

1. Pemerintah dalam hal ini bapak Presiden Jokowi, untuk tidak menerima usulan DPR tersebut, karena bisa menyakiti hati rakyat.
2. Sekjen dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI untuk bisa transparan dan akuntabel dalam perencanaan anggaran.
3. Ketua DPR baru (Bapak Bambang Soesatyo) harus fokus pada produktifitas bukan fasilitas.

CP:

Yenny Sucipto (0812-2224-0008) Sekjen FITRA

Gurnadi R. (0856-7174713) Peneliti FITRA